

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DILIHAT
DARI ASPEK PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
BOYOLALI PERIODE 2004-2008**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Niko Oktorra

B 200 050 149

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom. Otonomi bagi daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002:8).

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah tatacara dan administrasi hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai rumah tangga sendiri.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut pajak daerah merupakan salah satu sumber yang mempunyai kontribusi yang cukup besar.

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman, kebijakan dan arah bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, juga prosedur umum perpajakan daerah. Undang-Undang tersebut juga menetapkan jenis-jenis pajak daerah pada kabupaten sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak daerah yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Untuk itu kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus ditingkatkan.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga yang berorientasi pada profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Hamzah Ardi (2008:2) mengatakan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 37). Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.(Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 96 ayat 2).

Usaha untuk mengefektivkan pemungutan pajak daerah sebagai hasil pendapatan Asli Daerah nantinya akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah dari pemerintah pusat. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) kabupaten

Boyolali merupakan pelaksanaan kepala daerah di Boyolali di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber PAD lainnya ke dalam kas daerah Kabupaten Boyolali.

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak Daerah di Kabupaten Boyolali terdiri dari tujuh jenis pajak daerah yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. Dari ketujuh jenis pajak tersebut Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak daerah yang memberi kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Boyolali.

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar nomor dua setelah Retribusi Daerah, hal ini dikarenakan jenis retribusi di Kabupaten boyolali lebih banyak dibandingkan jenis pajak daerah. Jumlah penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Boyolali relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten boyolali. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian terhadap pajak daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dengan judul : "ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DILIHAT DARI ASPEK PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PERIODE 2004 – 2008".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas disusun permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Boyolali?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan membatasi masalah target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Boyolali yaitu pajak daerah mulai tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Boyolali.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dan untuk bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah, serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Menambah perbendaharaan pengetahuan praktis bagi peneliti dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Daerah, Tinjauan Tentang Pajak Daerah, Tinjauan Tentang Kinerja dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Kabupaten Boyolali serta Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.